



Media Title	Bisnis Indonesia	
Date	23 September 2014	Color
Section	News	Circulation
Page No	24	Article Size
Journalist	Anggara Fernando	Advalue
Frequency	Daily	PR Value

► TOL TRANS-SUMATRA

Negara Harus Terlibat Pembiayaan

JAKARTA—Asosiasi Tol Indonesia menyayangkan tidak adanya campur tangan pendanaan negara dalam penugasan tahap awal jalan tol Trans-Sumatra.

Fatchur Rochman, Ketua Asosiasi Tol Indonesia (ATI), menyatakan negara seharusnya menerapkan pola penugasan yang melindungi kelangsungan dalam berusaha bukan malah membebani keuangan perusahaan dengan meminta perusahaan berutang.

“Komitmennya [pemerintah] kurang, [tol Sumatra] IRR-nya [internal rate of return] kecil sehingga pasti tidak layak dijual kalau mengacu pada harga pokok,” ujar Fatchur kepada *Bisnis*, Senin (22/9).

IRR adalah pengembalian investasi atas suatu proyek. IRR biasanya dipatok pada angka 16% dikarenakan penjumlahan margin, suku bunga bank dan inflasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani penugasan BUMN PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun empat dari 23 ruas jalan Tol Trans-Sumatra. BUMN ini dibebaskan secara penuh dalam mencari pembiayaan.

Menurut Fatchur, pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pelayanan pemerintah. Penggunaan APBN untuk ta-

hap awal dapat dilakukan. Setelah jalan tol layak secara bisnis dapat dijual dan hasil penjualannya disetorkan kembali kepada negara.

“Seharusnya seperti Malaysia [membangun jalan tol] dari utara ke selatan sepanjang 400 km. Pemerintah memberikan kepastian kepada badan usaha dengan menanggung kerugian yang timbul jika ada,” katanya.

Dia menambahkan anggaran dari APBN ini dapat diambil dari pos pengalihan subsidi BBM yang lebih Rp400 triliun saban tahun.

Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan tidak ada anggaran dari APBN ataupun pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk Hutama Karya untuk menuntaskan keempat proyek ruas jalan tol ini.

Menurutnya, Kementerian sedang mengupayakan agar para BUMN konstruksi dapat turut serta dalam menyelesaikan penugasan ini. “Proyek sangat penting ini sebenarnya belum menarik secara komersial. HK bisa menggandeng BUMN konstruksi yang lain. Misalnya dengan sistem *turnkey* [diserahkan ke kontraktor],” jelas Dahlan. (Anggara Fernando)